

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945. Indonesia senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang berbagai wujud dari pemenuhan kewajiban terhadap rakyat Indonesia yaitu dengan melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintah, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan Negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan Negara. Salah satu sumber penerimaan yang menjadi pokok yaitu sumber penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara.¹

Sumber pendapatan yang ada di seluruh kota atau kabupaten kabupaten selain dari sisi pajak juga dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dari pemerintah. Berikut adalah APBD Kabupaten Tulungagung.

¹ Widi Widodo, Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak, (Bandung: Alfabeta,2010) hlm. 1

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung

Anggaran	2016	2017	2018
APBD	2.570,29	2.598,10	2.701,52
Pendapatan Asli Daerah	342,58	503,10	453,13
Dana Alokasi Umum	1.172,56	1.151,96	1.151,96
Dana Alokasi Khusus	477,44	376,01	438,50

Sumber: Data Publikasi BPKAD Kabupaten Tulungagung

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa, APBD Kabupaten Tulungagung di 3 periode yaitu tahun 2016-2018, pada tahun ke 3 yaitu 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,98% dibandingkan tahun 2017 yaitu Rp. 2.598,10 milyar, dan menjadi menjadi Rp. 2.701,52 milyar pada tahun 2018. Dana Alokasi Umum (DAU) masih merupakan penyumbang APBD terbesar DI Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 dan 2018 besarnya sama yaitu sebesar 1.151,96 milyar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga merupakan salah satu sumber APBD mengalami penurunan di tahun 2018 dari pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 memberi kontribusi sebesar Rp.503,10 milyar dan pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar Rp. 453,13 milyar. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar Rp. 447,44 milyar dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp.

376,01 milyar, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 438,50 milyar.²

Tabel 1.2
APBDes Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung

No.	Pos Penerimaan		Pos Pembiayaan		Pos Pengeluaran	
1.	PAD	324.700.000	Penerimaan pembiayaan	-	Pemerintahan	832.587.337
2.	Dana Desa (Tranfer)	1.385.272.337	Pengeluaran pembiayaan	-	Pembangunan	773.738.300
3.	Bantuan Keuangan	0			Pembinaan	43.348.000
4.	Pendapatan lain-lain	1.921.000			Pemberdayaan	100.293.700
					Penanggulangan bencana dan mendesak	1.921.000
	Jumlah	1.711.893.337	Jumlah	-	Jumlah	1.751.893.337

Sumber: Data Desa Jeli (APBDes 2019) data diolah peneliti

Dalam APBDes Desa Jeli tahun 2019 dijelaskan bahwasanya dana penerimaan yang di terima di Desa Jeli meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD), dana desa (Tranfer) atau dana yang diterima dari pusat Kabupaten Tulungagung, dan pendapatan lain-lain dari desa dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.711.893.337. Pos Pembiayaan di tahun 2019 di Desa Jeli berjumlah Rp. 0, Artinya tidak ada penerimaan pembiayaan maupun Pengeluaran

² Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kabupaten Tulungagung 2019. Diakses dari <http://Tulungagungkab.bps.go.id>, tgl 28 Maret 2020.

Pembiayaan. Sedangkan Pos pengeluaran diantaranya untuk keperluan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana dan mendesak dengan jumlah leseluruhan Rp.1.751.893.337.

Dari sisi pajak, Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk untuk pembangunan. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan melalui pajak. Selain itu, peran dan tanggung jawab masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pembangunan sangat diharapkan. Salah satu dari peran masyarakat adalah sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.³

Kelurahan desa Jeli merupakan salah satu Kelurahan di Kabupaten Tulungagung yang memiliki banyak potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, seiring dengan peningkatan pembiayaan pembangunan ekonomi diharapkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan

³ Sufyan Amirullah, “ *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat*”, Skripsi (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), hlm, 1-2.

Bangunan dari tahun ke tahun meningkat pula, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pun juga meningkat.⁴

Kontribusi pajak bumi dan bangunan tidaklah besar dalam struktur penerimaan negara, tetapi keberadaannya sangat berarti dan tidak dapat dihilangkan, namun demikian Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang tidak sulit dalam pengadministrasiannya karena dalam pembayarannya sudah dikelola oleh RT/RW di lingkungan masing-masing wajib pajak tinggal dan efisiensi pemungutannya rendah karena objek pajaknya cukup banyak.⁵

Pajak dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tulungagung, yang semata-mata sebagai upaya untuk memaksimal terhadap penggalan sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Sehingga, ini menjadi tuntutan tersendiri terhadap masing-masing kelurahan atau desa yang ada di Kabupaten tulungagung untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Karena kita sadari ataupun tidak, pajak ini merupakan satu tonggak yang menentukan maju tidaknya pembangunan disuatu daerah, yang secara langsung ini dapat

⁴ Insukindro “*Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, (Yogyakarta: Laporan Penelitian Kursus Keuangan Daerah FE-UGM, 1994), hlm,1.

⁵ Muhammad Ash. Shiddiq “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tangerang selatan*”, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm, 7-8.

dinikmati oleh semua golongan masyarakat yang berada di Kota Tulungagung.

Kelurahan Desa Jeli merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai tugas yang sama dengan Kelurahan lain yaitu melakukan pembantuan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Teknik penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yaitu dengan memberi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masing-masing ketua RT. Pemungutan pajak di tingkat perdesaan mudah dilakukan, karena berhubungan langsung dengan orang-orang yang sudah berada di lingkungan sekitar seperti RT dan RW. Selain itu pegawai kelurahan selaku fiskus atau pemungut pajak juga melakukan kontrol pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dengan pelayanan yang cukup baik yaitu dengan mendatangi satu persatu warga Wajib Pajak (door to door) untuk melakukan penagihan atau pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut adalah data Wajib Pajak Dan Penerimaan Kelurahan Desa Jeli.

Tabel 1.3

**Data Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Jeli
Tahun 2017-2019**

Tahun	Jumlah wajib pajak	Target penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB
2017	3.363 Orang	89.086.071	89.086.071

2018	3.363 Orang	90.046.503	90.046.503
2019	3.363 Orang	90.156.430	90.156.430

Sumber: Data Desa Jeli di oleh peneliti

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Jeli tahun 2017-2019 diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak konstan selama3 tahun yaitu di tahun 2017-2019 sebanyak 3.363 wajib pajak. Pada penerimaan pajak selama 3 tahun di tahun 2017-2019 juga stabil dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena sistem dari pemungutan pajak yang dijalankan di Desa jeli

Penelitian ini terdiri dari petugas pemungut pajak desa dan pemerintahan. Artinya penelitian ini terdapat dua arah penelitian yaitu petugas pemungut pajak desa yang di dalam penelitian mengarah kepada pelayanan islami atau pelayanan pajak yang diberikan oleh pihak Desa jeli kepada wajib pajak atas Bumi dan Bangunan, dan kepercayaan kepada petugas yang mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak. Artinya, jika perugas pemungut pajak sudah bertindak dalam jalur yang dapat dipercaya, maka wajib pajak akan memiliki rasa kepatuhan dalam membayar pajak.

Penelitian ini juga mengarah pada pemerintahan, dimana dalam penelitian ini kebijakan perpajakan adalah arah dari pemerintahan, mengingat kebijakan perpajakan adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga pihak pemungut pajak desa tidak berwenang dalam memberikan

sanksi bila terdapat wajib pajak yang tidak patuh. Jika kebijakan perpajakan sudah diterapkan dan berjalan dengan baik dan masyarakat sudah percaya bahwa kinerja pemerintah secara umum sudah baik, maka dengan sendirinya akan memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi, semakin kepercayaan warga kepada pemerintah, pengadilan, dan sistem hukum, semakin tinggi motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi dan menerapkan moralitas pajak.

Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah termasuk pajak Bumi dan Bangunan, maka setiap daerah perkotaan atau perdesaan berlomba-lomba mencari cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan memiliki cara masing-masing untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan dari meningkatkan Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah untuk menunjang pembangunan daerah yaitu dengan menyediakan fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh keseluruhan lapisan masyarakat seperti infrastruktur dan pembangunan yang bersifat umum. Salah satu cara yang dapat meningkatkan tingkat Kepatuhan membayar pajak di Desa Jeli adalah menerapkan Pelayanan yang baik, menumbuhkan rasa tingkat kepercayaan masyarakat wajib pajak terhadap petugas pemungut pajak, dan petugas pemungut pajak berusaha untuk mematuhi aturan atau kebijakan perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah.

Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan, dan juga latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis merasa tertarik untuk menguji dan meneliti tentang kepatuhan membayar PBB. Maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pelayanan Islami, Kepercayaan Kepada Petugas dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Desa Jeli”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian. Dimana ada kaitanya dengan pelayanan islami, kepercayaan, dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Desa Jeli. Sebab, pelayanan islami, kepercayaan, dan kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan pada Kelurahan Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Pelayanan Islami Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Desa Jeli ?
2. Apakah Kepercayaan Kepada Petugas Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Desa Jeli?

3. Apakah Kebijakan Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Desa Jeli?
4. Apakah Pelayanan Islami, Kepercayaan Kepada Petugas, Dan Kebijakan Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Desa Jeli ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian diatas maka dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Pelayanan Islami Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Desa Jeli
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Desa Jeli
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Desa Jeli
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Antara Pelayanan Islami, Kepercayaan Kepada Petugas Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Desa Jeli

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua aspek kegunaan, diantaranya yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai pajak bumi dan bangunan dan dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian yang sejenis selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Akademisi

Hasil penelitian dan seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan tentang Perpajakan khususnya Pajak Bumi Dan Bangunan.

b. Bagi Akademik / Institute

Hasil penelitian bisa digunakan sebagai dokumen akademik yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu oleh seluruh civitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung sebagai acuan atau bahan referensi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat terkait Pajak Bumi Dan Bangunan khususnya pada Kelurahan Desa Jeli Kecamatan Krangrejo Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini oleh peneliti selanjutnya diharapkan berguna sebagai sumber rujukan dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada variabel independen atau bebas (X) dan variabel dependen atau terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pelayanan islami (X1), Kepercayaan (X2), dan Kebijakan Perpajakan (X3). Serta variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Y). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji tentang pengaruh pelayanan islami, kepercayaan, dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pengambilan datanya dengan data Cross Section atau data yang berfokus pada satu tahun atau satu periode saja, yaitu di tahun 2019 yang telah di sediakan oleh kantor kelurahan desa jeli.

G. Penegasan Istilah

1. Devinisi Konseptual

Untuk menjelaskan dan mencegah adanya kesalahan dalam mengartikan sebuah istilah, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang penting dalam judul ini, adapun istilah yang berkaitan adalah :

a. Pelayanan Islami

Pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.⁶ Sedangkan Maksud dari pelayanan Islami dalam penelitian ini adalah pelayanan yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, diantaranya jujur, tanggung jawab (Amanah), dan murah hati.⁷

b. Kepercayaan

Arti percaya dalam kamus Bahasa Indonesia adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar, nyata atau yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau seseorang atau sesuatu (bahwa akan dapat memenuhi harapannya. Sedangkan kepercayaan memiliki arti anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yg dipercayai itu benar benar atau nyata.⁸

c. Kebijakan Perpajakan

Arti bijak dalam kamus Bahasa Indonesia, bijak adalah selalu menggunakan akal budinya, pandai, atau mahir. Sedangkan Kebijakan adalah Aturan dalam kepandaian, kemahiran, tujuan dan prinsip untuk

⁶ Kotler dalam buku Sangadji, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta:Andi,2013),hlm,99.

⁷ Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, (Semarang, Walisongo Press, 2009), hlm,153-162.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm. 1158

mencapai sasaran.⁹ Ada 3 faktor yang dapat menentukan keberhasilan perpajakan, diantaranya yaitu Aturan perpajakan, aturan administrasi, Aturan dasar pengenaan sanksi, dan factor eksternal yang meliputi factor yuridis, ekonomi, dan politik.¹⁰

d. Kepatuhan Membayar PBB

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pencapaian target dan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka ini disebabkan karena masih adanya wajib pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan yang dapat menyebabkan kelalaian dalam membayar pajak.¹¹

2. Devinisi Operasional

Definisi Operasional ialah pemberian penjelasan terhadap variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan pengertian kegiatan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm. 198

¹⁰ Muhammad Bakhrun Efendi, Kebijakan Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm. 26.

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008) hlm. 32.

ataupun suatu operasional yang bermanfaat untuk mengukur variabel.¹² Secara Operasional “Pengaruh Pelayanan Islami, Kepercayaan, Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Desa Jeli” merupakan sebuah penelitian yang membahas mengenai hubungan yang sistematis antara pelayanan islami, kepercayaan, dan kebijakan perpajakan dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri tentang isi keseluruhan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun isi sistematika pembahasan skripsi ini adalah :

Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari : latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi.

¹² M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011),Hal.126

BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari : teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya,kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari : pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran , teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN terdiri dari : hasil penelitian, yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis,

BAB V PEMBAHASAN berisi tentang : pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP berisi tentang : kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari : daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.